

KORAN
DIGITAL

radar.

EDISI RABU
6 SEP 2023

MEDIA

T E R D E P A N



GELAR BIMTEK RISK ASSESMENT, PEGAWAI DPK KALTIM DIBEKALI ILMU KEARSIPAN



DPK KALTIM TERPILIH JADI
TUAN RUMAH PERINGATAN
HARI KEARSIPAN NASIONAL KE-53



Bimtek Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPK) Kalimantan Timur (Kaltim).

GELAR BIMTEK RISK ASSESMENT, PEGAWAI DPK KALTIM DIBEKALI ILMU KEARSIPAN

SAMARINDA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPK) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Bimbingan Teknik (Bimtek) Risk Assessment Arsip pada Selasa (5/9/2023). Acara yang dimulai pukul 09.00 Wita tersebut dilaksanakan di Aula Oemar Dachlan Kantor DPK Kaltim Jalan Juanda Samarinda.

Kegiatan bimtek yang diikuti puluhan pegawai di lingkungan DPK Kaltim, sebagai penguatan keilmuan mengenai kearsipan dalam konteks pola pengarsipan yang benar.

Tampil sebagai pembicara, Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani. Dia mengatakan pentingnya peningkatan sumberdaya manusia di bidang kearsipan.

"Agar spirit kearsipan itu ada di Kaltim, kita berharap ada perubahan dalam kearsipan," ujar Rini.

Dia juga menjelaskan pentingnya mem-

buat perubahan pada pola kearsipan saat ini. Menurutnya, saat ini pola kearsipan Indonesia masih tertinggal dari negara maju.

"Misalkan mengikuti kemajuan zaman, seperti apa cara menyimpan arsip agar arsip itu bisa berumur panjang, tidak rusak, seperti memperhatikan ruangan yang akan digunakan, serta suhu yang pas agar arsip-arsip bisa berumur panjang dan bisa dinikmati oleh generasi kita," katanya.

Sementara itu, Kepala DPK Kaltim HM Syafranuddin, berharap dengan diselenggarakannya kegiatan ini para pegawai DPK Kaltim bisa menambah wawasan dalam kearsipan.

"Semoga bisa menambah ilmu, bagi semua pegawai DPK Kaltim, dalam pola kearsipan," harapnya. (adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari

PT RADAR DIGITAL NUSANTARA
Direktur ADHI ABDHIAN
General Manager
MUHAMMAD RAFI'I
Keuangan/HRD
ALFIANI HANIFAH SALSABILA
Penanggungjawab/Pemimpin
Redaksi IRFAN HADITAMA

Redaktur NUR ROBBI SYAI'AN, ANDHIKA DEZ-
WAN, BHAKTI SIHOMBING, IRFAN HADITAMA
Reporter: ADY WAHYUDI - ANDRIE APRIANTO,
VIQIH JATI KUSUMA - IQLIMA SYIH SYAKURAH,
ANNISA HASHIFAH RAHMAH
KANTOR PUSAT REDAKSI:
Jl. Haji Marhusin Gg. Arwana 3 No.73,
Kelurahan Selili Samarinda Ilir, Samarinda

BONTANG: Kompleks Ruko Halal Square, Blok D Rt 5 Nomor 9,
Jl. Jend Achmad Yani, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang
Utara, Kota Bontang, Kaltim 75311.
PPU : Desa Giri Mukti, RT.10, Giri Mukti, Penajam (Strat 3), Kab.
PPU, Kaltim, 76141 **KUKAR:** Jalan Gunung Belah RT 66 nomor
6, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kar-
tanegara **KUTIM:** Perumahan Pelangi Indah I Blok A4 Jalan
Pendidikan, Sangatta, Kutai Timur



Suasana rapat antara ANRI dan DPK Kaltim di atas kapal Pesut Etam.

DPK KALTIM TERPILIH JADI TUN RUMAH PERINGATAN HARI KEARSIPAN NASIONAL KE-53

SAMARINDA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kalimantan Timur (Kaltim) terpilih menjadi tuan rumah Hari Kearsipan ke-53 pada tahun 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani dalam kegiatan Audiensi Risk Assessment pada Senin (4/9/2023).

"Ini adalah bentuk koordinasi dari ANRI untuk memberitahukan secara langsung bahwa Kaltim sudah terpilih secara nasional menjadi tuan rumah acara Peringatan Hari Kearsipan Nasional yang ke-53 tahun," pungkasnya.

Rini mengatakan, hal ini harus segera diberitahukan lantaran persiapan agenda nasional tersebut harus dipersiapkan jauh-jauh hari.

"Ini kan acara nasional, nanti akan dihadiri oleh anggota kearsipan seluruh nasional. Diperkirakan 1.000 anggota dari seluruh provinsi dan Kabupaten/

Kota akan hadir," katanya.

Acara peringatan Hari Kearsipan Nasional ke-53 tersebut, rencananya akan dilaksanakan pada Mei 2024 mendatang. "Terjadwal tanggal 18 Mei mendatang," ujar Rini.

Sementara itu, Kepala DPK Kaltim HM Syafranuddin, mengaku menyambut dengan baik atas ditunjuknya DPK Kaltim sebagai tuan rumah Hari Kearsipan Nasional ke-53 di Kalimantan Timur.

"ini kesempatan bagus buat DPK Kaltim," ungkap HM Syafranuddin yang lebih akrab dipanggil Ivan ini.

Ivan mengaku pertemuan ini sangat penting, karena Kaltim harus mempersiapkan acara tersebut lebih matang dengan waktu yang masih panjang. (adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



**OPERASI ZEBRA DI PPU JUGA FOKUS DI SEPAKU,
DUKUNG KELANCARAN
LALU LINTAS PEMBANGUNAN IKN**



**SEPEDA LISTRIK
MASIH BEBAS TILANG**



Personel Polres Penajam Paser Utara (PPU) saat melakukan peneguran terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran selama Operasi Zebra Mahakam 2023. (Robbi/Media Kaltim Group)

OPERASI ZEBRA DI PPU JUGA FOKUS DI SEPAKU, DUKUNG KELANCARAN LALU LINTAS PEMBANGUNAN IKN

PPU - Polres Penajam Paser Utara (PPU), melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas), selama 2 pekan menjalankan Operasi Zebra Mahakam 2023. Operasi ini juga difokuskan di Kecamatan Sepaku untuk mendukung kelancaran lalu lintas dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Operasi Zebra Mahakam resmi dimulai dengan Apel Gelar Pasukan di halaman Mapolres PPU pada Senin, 4 September 2023, dan akan berlangsung hingga 17 September 2023.

Kasat Lantas Polres PPU, AKP Ning Tyas Widyas Mita, menjelaskan bahwa beberapa pelanggaran menjadi sasaran Operasi Zebra Mahakam 2023, sesuai dengan tema penegakan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) Menuju Pemilu 2024.

"Dalam persiapan, seluruh personel dan sarana pendukung telah disiapkan dengan baik. Hal ini memungkinkan pelaksanaan operasi berjalan optimal dan men-

capai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan," ujar Ning Tyas pada Selasa, 5 September 2023.

Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan Operasi Zebra ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia selama dua pekan. "Polri saat ini sedang menjalankan kegiatan operasi wilayah dengan kode OPS Patuh 2023, dengan fokus pada tindakan preemtif dan preventif, serta pendekatan persuasif yang humanis," tambah Ning Tyas.

Dalam pelaksanaannya, prioritas penertiban akan difokuskan pada pelanggaran seperti melawan arus lalu lintas, berboncengan lebih dari satu orang, kecepatan melebihi batas maksimal, dan pengemudi roda 4 yang tidak menggunakan seatbelt.

"Sasaran utama juga mencakup pengendara yang menggunakan handphone saat berkendara, pengemudi di bawah umur atau yang tidak memiliki SIM sesuai dengan Pasal 281, serta pengendara yang tidak menggunakan helm standar SNI, dan

pelanggaran lainnya," jelasnya.

Tujuan dari Operasi Zebra ini, lanjut dia, adalah menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di lokasi rawan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas yang fatal, serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Untuk pengendara yang melanggar, akan dikenakan sanksi berupa tilang, baik secara mobile maupun manual, sebagai efek jera agar pengendara patuh terhadap aturan saat berkendara.

Selain itu, Satlantas Polres PPU juga terus berupaya memberikan dukungan untuk kelancaran distribusi logistik pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku. "Polres PPU siap menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas untuk mendukung kelancaran pembangunan IKN," tutup Ning Tyas. **(SBK)**



SEPEDA LISTRIK MASIH BEBAS TILANG

BALIKPAPAN - Operasi Zebra Mahakam 2023 baru saja dimulai, dan jajaran Satlantas di Kaltim menjalankannya selama 14 hari, mulai tanggal 4 September hingga 17 September 2023 mendatang. Seiring dengan berjalannya Operasi Zebra Mahakam 2023, tren sepeda listrik menjadi perhatian, terutama di Kota Balikpapan.

Penggunaan sepeda listrik semakin meningkat, tidak hanya di kompleks perumahan, tetapi juga di jalan raya. Pengendara sering kali tidak menggunakan helm, dan terlihat bahwa sebagian besar dari mereka masih di bawah umur.

Kabag OPS Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim, AKBP Bangun Isworo, menjelaskan bahwa penggunaan sepeda listrik sebenarnya sudah diatur dengan aturan tertentu yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

"Dalam Permenhub tersebut, telah diatur spesifikasi sepeda listrik, persyaratan penggunaan, dan jalur yang dapat dilalui oleh

alat transportasi yang termasuk baru di Indonesia," ujarnya, Selasa (5/9/2023).

Pasal 2 ayat 2 dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa sepeda listrik harus memenuhi persyaratan keselamatan seperti lampu utama, reflector di posisi belakang atau lampu, sistem rem yang berfungsi dengan baik, reflector di sisi kiri dan kanan, klakson atau bel, dan kecepatan maksimum 25 km/jam.

"Sedangkan kendaraan tertentu dapat mencapai kecepatan hingga 55 km/jam," jelasnya.

Lebih lanjut, Pasal 4 ayat 1 mengatur persyaratan penggunaan sepeda listrik, yang mengharuskan pengguna berusia minimal 12 tahun, wajib menggunakan helm, dan tidak diizinkan mengangkut penumpang kecuali sepeda listrik dilengkapi dengan tempat duduk penumpang.

"Pasal yang sama juga melarang modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan, mewajibkan pemahaman dan kepatuhan pada tata cara berlalu lintas, serta memberikan prioritas pada pejalan kaki, menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain, dan membawa kendaraan dengan penuh konsentrasi," tam-

bah Bangun.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa pengguna sepeda listrik berusia 12 hingga 15 tahun harus didampingi oleh orang dewasa.

Pasal 5 ayat 1 mengatur jalur yang boleh dilalui oleh sepeda listrik, mencakup jalur khusus dan kawasan tertentu yang meliputi lajur sepeda dan lajur yang disediakan secara khusus untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

"Kemudian, kawasan tertentu melibatkan pemukiman, jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (car-free day), kawasan wisata, area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik yang terintegrasi," ujarnya lagi.

Bangun menambahkan bahwa meskipun aturan telah ada terkait penggunaan sepeda listrik, saat ini belum ada peraturan atau perintah untuk memberlakukan tilang terhadap pelanggar aturan tersebut. Saat ini, peneguran dilakukan dengan pendekatan yang humanis. **(bom)**



**EDI DAMANSYAH – RENDI SOLIHIN MAKIN SOLID,
DIAMINI PDI-P,
FOKUS WUJUDKAN KUKAR IDAMAN**



**SITA 9 PAKET SABU,
POLISI AMANKAN 4 PRIA**



Edi Damansyah - Rendi Solihin

EDI DAMANSYAH - RENDI SOLIHIN MAKIN SOLID, DIAMINI PDI-P, FOKUS WUJUDKAN KUKAR IDAMAN

TENGGARONG - Terwujudnya 23 program Kukar Idaman yang menjadi turunan visi-misi kepemimpinan Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wabup Kukar Rendi Solihin, tak lepas dari kekompakan keduanya. Jauh dari kata keretakan, kolaborasi figur Edi dan Rendi ini justru makin solid emnjelang akhir masa jabatan.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Aulia Rahman Basrie menuturkan, semakin kompaknya kepemimpinan Edi-Rendi saat ini, tak sulit untuk dilihat. Berbagai karya nyata pembangunan serta terwujudnya visi misi yang sudah direalisasikan, merupakan bukti konkret kekompakan keduanya.

Meski menjelang akhir masa jabatan, kedua kader PDI Perjuangan ini pun mengaku memilih fokus untuk tetap bekerja mewujudkan berbagai janji politik dan visi-misi serta program

yang sudah tertuang pada RP-JMD Kukar.

"Jadi kalau seandainya ada isu atau ada pihak yang mengabarkan ada keretakan antara keduanya, pihak tersebut harus melihat lagi secara jernih. Tidak mungkin ada keretakan apa lagi perpecahan," tambahnya.

Aulia menuturkan, saat ini baik Edi Damansyah maupun Rendi Solihin, sama-sama berupaya memaksimalkan perannya sebagai kepala daerah. Peluang keduanya kembali berpasangan pun dikatakan sangat terbuka lebar.

Keinginan tersebut menurutnya banyak datang dari masyarakat yang menginginkan keduanya kembali memimpin Kukar. Hanya saja, lagi-lagi keduanya sedang fokus untuk bekerja dengan baik.

"Kedua figur ini sama-sama memiliki kesamaan karakter. Yaitu ingin sekali membuktikan dulu karya kepemimpinan mer-

eka. Sedangkan untuk urusan Pilkada selanjutnya disebut urusan nomor dua," lanjutnya.

Di tengah keduanya yang sedang fokus berkontribusi dengan baik, Aulia mengakui bahwa ada saja pihak yang menebarkan isu tak menyenangkan. Mulai dari isu keretakan hingga isu Pak Bupati Kukar Edi Damansyah sudah terhitung dua periode.

Namun atas kepentingan masyarakat yang lebih luas, maka PDI-Perjuangan memberikan peluang bagi keduanya untuk tetap terus bekerja dengan baik. Sehingga tak perlu ditanggapi kabar miring yang dianggap tidak konstruktif tersebut.

"Bahkan hingga saat ini, kolaborasi keduanya semakin terasa dampaknya. Tentu akibat kesolidan yang terus terbangun dengan baik. Supaya bisa ada pembuktian hasil pembangunan dengan masyarakat," tutupnya. (MK)

Editor: Agus Susanto



Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Diskop-UKM Kabupaten Kutai Kartanegara, Dianto Raharjo (Ady/Radar Kukar)

DISKOPUKM KUKAR BAKAL BANGUN KLINIK KOPERASI & UMKM DI 3 KECAMATAN

TENGGARONG - Pada tahun ini, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DiskopUKM) Kutai Kartanegara (Kukar) berencana membangun Klinik UMKM di tiga Kecamatan.

Tersebar di Kecamatan Anggana, Kota Bangun, dan Muara Badak. Pembangunan Klinik UMKM ini diharap akan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Diskop-UKM Kukar, Dianto Raharjo, menjelaskan. Klinik Koperasi dan UMKM sendiri merupakan sebuah wadah layanan pengembangan usaha terpadu, yang menyediakan layanan terhadap pengembangan usaha yang cepat, mudah dan profesional.

"Tujuan didirikan klinik ini adalah untuk memberikan layanan gratis kepada masyarakat dan pelaku usaha yang bera-

da di wilayah Kabupaten Kukar," kata Dianto Selasa (5/9/2023).

Ia menambahkan, klinik ini didesain untuk memenuhi kebutuhan koperasi dan UMKM yang berorientasi pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan pelaku usaha.

"Kenapa kita fokuskan ke sini (tiga Kecamatan), karena di kecamatan tersebut sudah ada UMKM center-nya," tambahnya.

Dianto yakin, dengan dibentuknya klinik UMKM ini dapat lebih mengoptimalkan fungsi UMKM center. Ia berharap dapat mempermudah urusan administrasi pelaku UMKM di kecamatan.

"Jadi tidak usah jauh-jauh ke DiskopUKM hanya untuk minta fasilitasi NIB dan pelatihan oleh Dinas," pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha Ratnasari



Kaban Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti (Ady/Radar Kukar)

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Kesbangpol Kukar Bakal Gelar Kemah Kebangsaan Pemuda Lintas Agama

TENGGARONG - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Kartanegara (Kukar), berencana melaksanakan kegiatan kemah kebangsaan generasi muda lintas agama, Selasa (5/9/2023).

Kegiatan ini bakal berlangsung selama tiga hari, mulai dari tanggal 29 September hingga puncaknya pada peringatan hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2023.

"Tanggal 1 itu puncaknya ditandai dengan kita melakukan apel dalam rangka hari kesaktian Pancasila," kata Rinda Desianti, Kaban Kesbangpol Kukar.

Ia menjelaskan bahwa, kegiatan ini merupakan kolaborasi yang harus dihadirkan, dalam berupaya menjaga kondusifitas wilayah Kukar. Apalagi Kukar dikenal sebagai kabupaten yang heterogen, atau terdiri dari berbagai suku dan agama.

"Kita sudah masuk di tahun politik dan tahun depan kita akan masuk pemilu. Kita berharap agar generasi muda Kukar

berkontribusi dalam menjaga kondusifitas wilayah," tambahnya.

Sehingga momentum hari kesaktian Pancasila dianggap sangat ideal, untuk kembali merefleksikan nilai-nilai ideologi bangsa yang diperjuangkan oleh pendahulu bangsa ini.

Menurut Rinda, lewat kemah kebangsaan lintas agama ini, diharap mampu menumbuhkan nilai-nilai toleransi antara umat beragama. Khususnya pemuda, sehingga mampu menjadi pelopor persatuan bangsa.

"Pemuda harus mengambil peran di tengah sengitnya kontestasi demokrasi. Yaitu dengan senantiasa menjaga kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Dengan sikap toleransi, saling menghargai dan terus mensosialisasikan pada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan isu SARA," pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyud
Editor : Nicha Ratnasari



Keempat tersangka yang berhasil diamankan polisi (Istimewa)

SITA 9 PAKET SABU, POLISI AMANKAN 4 PRIA

TENGGARONG - Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Kutai Kartanegara (Kukar), berhasil mengamankan empat orang pria yang kedapatan memiliki 9 paket narkoba jenis sabu. Mereka ditangkap pada hari yang sama, Senin (4/9/2023).

Keempat pria ini diketahui berinisial FA (38), MYH (33), DM (25) dan RW (31). Keempatnya ditangkap pihak kepolisian di lokasi yang berbeda.

DM dan RW ditangkap pada pengungkapan yang sama. Mulanya polisi terlebih dahulu meringkus DM yang kedapatan membawa dua paket sabu seberat 0,48 gram di Jalan H. Djafar Seman, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, DM mengaku kalau barang haram tersebut didapat dari RW. Kemudian RW kita tangkap di kediamannya di Jalan Etam, Kelurahan Jahab, Kecamatan Tengagrong," terang AKBP Heri Rosena, Kapolres Kukar.

Sementara itu MYH ditangkap di Jalan Mangkuraja 1, Kelurahan Loa Ipuh, Keca-

matan Tenggarong. MYH berhasil diamankan setelah sebelumnya polisi melakukan pengintaian yang berdasarkan pada laporan warga.

MYH ditangkap bersama 5 poket sabu yang disimpan di kamarnya. Setelah diinterogasi, pria itu mengaku bahwa iya membeli barang haram tersebut dari FA.

"FA kita tangkap di Jalan Patin, Kelurahan Timbau. Dari kamarnya kita mendapati dua poket sabu," tambahnya.

Dari keempat pelaku, berhasil diamankan barang bukti sabu-sabu seberat 40,25 gram, lima bundel plastik klip, lima sendok takar sedotan, empat pipet kaca, dua alat hisap berupa bong, dan dua alat timbangan digital. Serta empat unit handphone, satu tas dan satu unit sepeda motor Honda PCX warna abu-abu.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kini keempatnya telah ditahan di Makopolres Kukar.

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Nicha Ratnasari



ADROFDITA GANTIKAN MAR'UF EFFENDI

BACA HALAMAN A2



**PAMA Beber CSR dan
Pertumbuhan Berkelanjutan dalam
Media Gathering Tahun 2023**
BACA HALAMAN A3



Adrofdita Gantikan Mar'uf Effendi

Minta Dukungan, Siap Berkontribusi di Komisi 1 dan Bapemperda DPRD Bontang

BONTANG - Ir. H. Adrofdita resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang pada Selasa (5/9) di gedung DPRD Bontang.

Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Gubernur Kaltim, Isran Noor, mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Bontang sisa masa jabatan Periode 2019-2024.

Setelah resmi dilantik, Adrofdita, langsung ditempatkan di Komisi 1 dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bontang.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal, menyatakan, bawah selain menjadi anggota Komisi 1, Adrofdita juga ditempatkan sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bontang. "Perubahan ini berlaku efektif sejak 5 September 2023," katanya.

Sehingga saat ini terjadi perubahan anggota Komisi 1 DPRD Bontang terdiri

dari Ketua Muslimin, Wakil Ketua Raking, Sekretaris Irfan, Maming (anggota), Abdul Haris (anggota), Rusli (anggota) dan Adrofdita (anggota).

Sementara untuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bontang terdiri dari Ketua Nursalam, Wakil Ketua Ridwan, Sekretaris Yessy Waspo Prasetyo, Bahtiar Wakang (anggota), Siti Yara (anggota), Raking (anggota), Irfan (anggota) Maming (anggota), dan Adrofdita (anggota).

Sementara itu, Adrofdita mengucapkan terima kasih dan memohon dukungan agar bisa mengemban amanah dengan baik dan terhindar dari mudharat yang memberatkan. "Saya siap untuk berkontribusi dan mohon masukan dari teman-teman media," katanya.

Untuk diketahui, pelantikan Adrofdita ini menyusul adanya Surat Keputusan Gubernur Kaltim yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2023 merespons usulan PAW Anggota DPRD dari PKS

yang diajukan oleh Ketua DPRD Bontang dan juga surat serupa dari Walikota Bontang.

Maruf Effendi, yang sebelumnya menjabat Anggota DPRD Bontang dari Fraksi PKS, mendapat penghormatan atas kontribusinya sebelumnya.

Pengambilan sumpah jabatan Adrofdita sebagai anggota DPRD Bontang juga disertai dengan pemberian hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelantikan ini dilakukan melalui Rapat Paripurna ketiga dalam Masa Sidang I DPRD Bontang dan merupakan upacara pengucapan sumpah pengganti antar waktu anggota DPRD Bontang untuk sisa masa jabatan tahun 2019-2024.

Hadir dalam acara Rapat Paripurna ini adalah Walikota Bontang, Basri Rase, Wakil DPRD Bontang, Junaidi, unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan undangan lainnya.

Penulis/Editor: Agus Susanto

PAMA Beber CSR dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam Media Gathering Tahun 2023

BALIKPAPAN- PT PAMAPERSADA NUSANTARA (PAMA), perusahaan terkemuka dalam industri pertambangan di Indonesia, menggelar acara Media Gathering Tahun 2023 di Four Points Hotel, Balikpapan, Kaltim, pada Senin, 4 September 2023.

Acara ini merupakan bentuk apresiasi PAMA kepada media yang telah berperan penting dalam mempublikasikan kegiatan dan prestasinya serta mempererat hubungan dengan media.

PAMA menjalankan kegiatan ini bekerja sama dengan Kalimantan Prima Persada (KPP) sebagai salah satu mitra mereka.

Tema dari Media Gathering tahun ini, "Road to 30 Years PAMA – Sustainability Growth," mencerminkan semangat perusahaan untuk terus tumbuh dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Acara dimulai dengan sambutan dari para pemimpin PAMA, antara lain Sulasman sebagai Project Manager PAMA Site BPOP, Gunawan Setiadi sebagai Kepala Departemen Keamanan & Hubungan Eksternal PAMA, dan Daniel sebagai Kepala Seksi CSR KPP.

Kegiatan selanjutnya melibatkan pemaparan materi dari dua narasumber utama, yaitu Bayu Handoko S. – Kepala Seksi CSR PAMA Site Kideco, dan Bangkit Pratama – Pejabat Pengelolaan Komunikasi KPP.

Mereka membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan program CSR di PAMA Site Kideco (KIDE), yang mencakup lima pilar



utama: ekonomi, kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan budaya sosial.

Dalam pilar ekonomi, PAMA Site KIDE telah berhasil membina 142 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitas pembiayaan seperti KUR dan LKM.

Di bidang kesehatan, PAMA aktif dalam program penanggulangan stunting di Kabupaten Paser, di mana tahun 2023 ini, PAMA Site KIDE menjadi ayah asuh untuk 10 balita stunting di Kecamatan Batu Sopang dan Muara Samu, serta melaksanakan program penyuluhan gizi melalui posyandu binaan, yang saat ini berjumlah enam.

Pilar pendidikan tidak ketinggalan, dengan program pelatihan guru sekolah adiwiyata, peningkatan kapasitas calon sekolah adiwiyata hingga tingkat nasional, dan seminar guru yang bertujuan mewujudkan pendidikan yang merdeka.

Di lingkungan, PAMA Site KIDE terli-

bat dalam Program Pranaraksa Center (Penanaman Buah Langka) dan pembangunan nurseri serta penanaman pohon yang bekerja sama dengan DLH Kabupaten Paser.

Di bidang budaya sosial, CSR PAMA Site KIDE memberikan bantuan dan santunan melalui bazaar Ramadhan, mendukung perkembangan sanggar tari, serta memberikan pelatihan kepada gugus tugas tanggap bencana, semua ini dilakukan demi kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional mereka.

Media Gathering ini dihadiri 28 media, baik tingkat nasional maupun lokal, menjadikannya sebagai acara terbesar di provinsi dengan wilayah operasional PAMA yang terbanyak.

Dengan suksesnya acara ini, PAMA berharap hubungan yang sudah terjalin dengan media selama ini akan semakin erat dan kuat, memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. (dar)





Anggaran Wolbachia Nasional Rp 10 Miliar, Dirjen P2P Akan Tambah Kota dengan Insiden Rate Tinggi

BONTANG - Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu meluncurkan program pelepasan nyamuk berwolbachia di Kota Bontang pada Selasa (5/9/2023). Maxi Rein mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk implementasi wolbachia secara nasional mencapai Rp 10 miliar. Setiap daerah yang menjalankan program wolbachia juga harus menganggarkan dana secara mandiri.

Ia menjelaskan bahwa anggaran ini telah disiapkan di tingkat nasional dan mencerminkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menyediakan telur nyamuk, logistik, dan pelatihan, sementara daerah bertanggung jawab atas operasional kader-kader wolbachia.

"Anggaran kita ini kan kerja sama dengan daerah. Ada tanggung jawab pusat dan tanggung jawab daerah. Kita memfasilitasi telur nyamuk, logistik, dan pelatihan lainnya. Daerah bertanggung jawab atas operasional kader-kader wolbachia," jelasnya

kepada awak media pada Selasa (5/9/2023).

Selanjutnya, Maxi menyatakan bahwa implementasi wolbachia akan terus dievaluasi, dengan fokus pada persentase nyamuk berwolbachia di Kota Bontang.

"Jika efektivitasnya sudah terbukti seperti di Jogjakarta, di mana insiden ratenya turun secara signifikan setelah enam tahun pelaksanaan, kami akan melanjutkannya. Bontang melaksanakannya secara serentak, dan kami akan terus mengevaluasinya," kata Maxi.

Dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus melakukan produksi telur nyamuk berwolbachia secara nasional dengan menggunakan teknologi baru.

"Kami akan menambah kota-kota lainnya berdasarkan data terbaru. Kami akan melihat data insiden rate di bulan Desember dan menentukan kota mana yang akan menjadi prioritas berikutnya," tambah Maxi. (yah)

Penulis: Yahya Yabo

Editor: Nicha Ratnasari



Resmi Luncurkan Program Bontang Berwolbachia Serentak untuk Kendalikan DBD

BONTANG - Program Bontang Berwolbachia Serentak (Bawis) secara resmi diluncurkan di halaman parkir Bontang Kuala pada Selasa (5/9/23).

Peluncuran ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu.

Maxi Rein Rondonuwu menjelaskan bahwa tahap-tahap implementasi program ini akan dijalankan dengan baik, melibatkan pemerintah kota hingga masyarakat, termasuk upaya edukasi.

"Kerjasama lintas sektor dalam program ini sangat baik. Proses sosialisasi dan tahap-tahap lainnya telah dirancang dengan baik, bahkan penentuan lokasi penempatan ember-ember nyamuknya telah dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi," ungkapnya.

Pemilihan Kota Bontang sebagai pilot project Wolbachia dianggap tepat karena kota ini mengalami kasus kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah kota juga serius dalam melaksanakan

proyek ini dan dianggap sangat memahami konsepnya.

"Di Indonesia, kematian akibat DBD biasanya mencapai lebih dari 1000 kasus dalam setahun, dan karena nyamuk tidak mungkin dapat diberantas, Wolbachia menjadi solusi yang efektif," tambahnya.

Lebih lanjut, program ini akan diperluas ke kota lain, termasuk Kota Denpasar, Bali. Awalnya, program ini ditujukan hanya untuk 5 kota, yaitu Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang, dan Bontang.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, Toetoe Pribadi Ekowati, melaporkan tahap-tahap penerapan Wolbachia yang telah dilakukan sejak akhir tahun 2022. Proses ini melibatkan pelantikan koordinator lapangan atau kader Wolbachia sebanyak seratus orang.

"Dengan kerjasama yang berkelanjutan, saya berharap teknologi Wolbachia ini dapat membantu kami menekan kasus DBD dan angka kematian di Kota Bontang," ujarnya.

Dalam kesuksesan program ini, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung program pemerintah. Dukungan tidak hanya harus datang dari kalangan pemerintahan, melainkan juga dari masyarakat umum.

Rahman, perwakilan dari B2P2VRP Salatiga, memberikan penjelasan singkat tentang tahapan perkembangan nyamuk berwolbachia. Nyamuk-nyamuk ini akan "diternak" dalam ember, di mana telur nyamuk yang ditempatkan dalam air akan berkembang menjadi jentik nyamuk dalam 1 hingga 2 hari, dan selanjutnya berkembang menjadi pupa dan nyamuk dewasa dalam beberapa minggu.

"Setiap dua minggu, air dalam ember akan diganti dan telur baru akan ditempatkan selama enam bulan. Dari telur hingga menjadi nyamuk membutuhkan waktu sekitar 2 minggu, oleh karena itu, setiap dua minggu proses ini akan diperbarui," tutupnya. (yah)

Penulis: Syakurah

Editor: Agus Susanto



Lomba Karaoke di Halaman Parkir Masjid Terapung, Jamaah Keluhkan Lokasi Pelaksanaan Kurang Tepat

BONTANG - Perayaan Hari Nelayan Nasional 2023 di Bontang mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat, khususnya para jamaah masjid Darul Irsyad Al-Muhajirin di Kelurahan Loktuan. Kritik tertuju pada lokasi panggung yang berada di halaman parkir masjid tersebut.

Kegiatan ini telah dimulai sejak Senin (4/9/23) kemarin dan akan berlangsung hingga Rabu (6/9/23) besok. Beberapa jamaah mulai mempertanyakan mengenai lomba karaoke yang diadakan di sana.

Kritik muncul karena karaoke yang diadakan bukanlah pengisi lagu-lagu religi, kasidah, atau araupun rabana. Bahkan, pada acara puncak rencananya akan ada bintang tamu, yakni artis dangdut Bintang Pantura.

"Kami juga tidak menyangka acara sebesar ini, dan ternyata banyak war-

ga dan jamaah yang bertanya-tanya terkait kegiatan yang diadakan di halaman parkir masjid," jelas Jumadi, Sekretaris Ta'mir Masjid.

Sebelumnya, dinas terkait telah diberitahu agar memberikan pemberitahuan tertulis jika ingin menggunakan halaman parkir tersebut. Namun, karena acara sudah berjalan, pihak masjid memutuskan untuk memperingatkan bahwa selama acara berlangsung, pengunjung dan peserta lomba harus menggunakan pakaian yang sopan.

"Kalau memang ada karaoke dan dangdutan seperti yang dilombakan, sebaiknya ke depan dapat memilih lokasi yang lebih tepat, karena jamaah masjid juga merasa kurang nyaman saat harus melewati keramaian setelah shalat isya," tambahnya.

Meskipun demikian, Jumadi sebe-

narnya mendukung acara semacam ini, terutama karena kegiatan pemerintahan seperti ini penting untuk menghargai masyarakat, khususnya para nelayan di Bontang.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP3, Idhamsyah, menjelaskan bahwa acara yang diselenggarakan oleh DKP3 telah diberi peringatan bahwa selama acara di sana, waktu-waktu sholat harus dihormati dan semua peserta lomba karaoke serta pengisi acara harus berbusana yang rapi.

"Alhamdulillah, semalam semuanya berjalan lancar. Para peserta secara kebetulan mengenakan busana yang sopan, dan kami sangat mematuhi aturan waktu agar jamaah yang akan melakukan shalat tidak terganggu," ungkapnya.

Penulis: Syakurah

Editor: Agus Susanto



JASAD BOCAH KELAS 2 SD YANG TENGGEAM DI PANTAI VIRAL

DITANDU MELEWATI JEMBATAN SAMBALIUNG



**7 FRAKSI DPRD BERAU
SETUJUI RAPERDA
PERUBAHAN APBD 2023 JADI PERDA**



Kepala DPMPTSP Berau, Nanang Bakran.

TREN REALISASI INVESTASI NAIK, SEKTOR PARIWISATA CUKUP MENJANJIKAN

TANJUNG REDEB - Realisasi investasi di Kabupaten Berau telah mencapai Rp 2,1 triliun dari target Rp 4 triliun, hingga triwulan ketiga tahun 2023 ini. Dengan nilai investasi tertinggi pada sektor pertambangan yang mencapai 60 persen.

Itu disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DP-MPTSP) Berau, Nanang Bakran.

Dirinya yakin target investasi tahun ini bisa tercapai. Itu juga berdasarkan target realisasi investasi tahun lalu yang mampu mencapai target, yang secara umum pergerakannya cukup positif.

Kendati begitu, pihaknya belum dapat memastikan soal target investasi tahun depan. Pergerakan investasi tahun ini masih perlu dipelajari kembali. Jika targetnya memang perlu diubah, jelas akan diubah.

"Kami masih mempelajari investasi tahun ini dan akan dievaluasi. Baru tahun depan bisa dibaca. Tapi trennya sedang naik," terangnya.

Disebutnya, ada beberapa hal terutama pergerakan pertam-

ban dan perkebunan juga semakin naik, termasuk beberapa non tambang ikut naik.

Diantaranya, pertanian dalam arti luas hingga pariwisata. Yang mana sektor pariwisata di Bumi Batiwakkal diprediksi cukup menjanjikan. Seiring dengan isu perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim tahun depan dan Berau sebagai penyangga pada sektor tersebut.

"Paling tinggi masih pertambangan yang mendominasi sekitar 60 persen mempengaruhi pendapatan kita," paparnya, Selasa (5/9/2023).

Berjalan hingga triwulan ketiga ini, diungkapkannya tidak ada hambatan dalam realisasi investasi. Bahkan, menurutnya akan melebihi target. Tentunya juga tidak lepas dari peran tim di lapangan yang cukup interaktif soal investasi.

"Alhamdulillah berjalan lancar, Insya Allah bisa melebihi target dari Rp 4 triliun," ucapnya.

Di samping itu pihaknya akan memaksimalkan sistem kolaborasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Termasuk kerjasama den-

gan media massa yang juga ikut mempromosikan.

Nanang menambahkan, DP-MPTSP bersama Diskoperindag, Disbun dan Disbudpar juga sempat mengikuti Invesda Expo 2023 di Surabaya, belum lama ini. Tujuannya memaparkan potensi Berau selain pertambangan dan pertanian guna mendorong investor datang.

Serta menawarkan kemudahan dalam melakukan investasi di Berau. Terlebih sektor pariwisata yang ditawarkan semaksimal mungkin untuk persiapan Berau sebagai penyangga IKN dari sektor pariwisata.

Dirinya juga bersyukur akan ada maskapai penerbangan berbadan besar yang masuk ke Berau. Diharapkan dapat meningkatkan investasi dari sektor pariwisata.

"Karena bagaimana pun kita harus siap dengan IKN. Alhamdulillah maskapai penerbangan berbadan besar sudah masuk ke Berau. Mungkin itu juga bisa menambah investasi dari sektor pariwisata," harapnya. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izz
Editor: Dezwan



Pencarian korban tenggelam di pantai viral akhirnya usai setelah hilang selama 3 hari. (Ist)

JASAD BOCAH KELAS 2 SD YANG TENGGELAM DI PANTAI VIRAL TERPAKSA DITANDU MELEWATI JEMBATAN SAMBALIUNG

TANJUNB REDEB - Usai dilakukan pencarian selama tiga hari, bocah laki-laki berinisial MCS (8) yang tenggelam di objek wisata musiman pantai viral Sungai Kelay, Kampung Tumbit Dayak akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan. Sekitar 2 km jauhnya dari titik awal korban dinyatakan hilang.

Kapolsek Sambaliung, IPTU Iwan Purwanto menjelaskan, pihaknya berhasil menemukan tubuh korban tersangkut diranting pohon sekitar pukul 07.00 WITA.

"Kami melakukan pencarian kembali dengan menyisir wilayah hilir sungai Kelay," katanya, Selasa (5/9/2023).

Kemudian tim gabungan melakukan evakuasi jasad korban dengan menggunakan satu unit speedboat dan selanjutnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Rivai.

"Jasad korban sudah kita bawa ke rumah sakit untuk selanjutnya jenazah dikembalikan ke rumah keluarga korban," tuturnya.

Diungkapkannya, saat men-

gantarkan jenazah ke rumah korban yang berada di Kecamatan Sambaliung, terpaksa pihaknya membawa tandu melewati Jembatan Sambaliung. Lantaran masih dilarang lewat.

"Terlalu lama kalau harus dibawa dan menyeberang menggunakan LCT. Jadi kami menggunakan tandu kemudian dijemput ambulans dari sisi Sambaliung," bebernya.

Sebelumnya, korban bersama keluarga sedang berwisata di daerah Sungai Kelay Kampung Tumbit Dayak. Saat korban asyuk bermain air di pinggir sungai tiba-tiba terseret arus kemudian tenggelam. Korban dinyatakan hilang pada 3 September lalu sekitar pukul 10.00 WITA.

Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Berau, Novian Hidayat menyebutkan, saat jenazah korban ditemukan, kondisi tubuh dalam keadaan utuh dan tidak ada tanda-tanda adanya luka.

"Total waktu pencarian tim gabungan sekira 45 jam dari wak-

tu korban menghilang," ujarnya.

"Saya berterimakasih kepada pihak-pihak yang bekerja keras hingga korban ditemukan. Semoga sinergi ini terus meningkat dan terus kompak," tandasnya.

Selain itu, terkait ambulan yang tidak bisa melintasi jembatan Sambaliung, Ketua PPK DPURPR Kaltim, I Nyoman Swardika, menyampaikan permohonan maaf atas apa yang terjadi.

"Dikarenakan baru dua hari kemarin kami melakukan pengecoran bagian perkuatan jembatan P1 dan P2, dimana P1 dan P2 merupakan tumpuan dan menerima beban langsung," terangnya.

Dijelaskannya, kondisi beton masih dalam keadaan belum kering dan jika menerima beban berlebih dikhawatirkan akan terjadi keretakan di bagian tersebut.

"Kami sudah menyiapkan 24 jam pelayanan LCT, terlebih untuk kondisi darurat sudah tentu menjadi prioritas," pungkasnya. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Dezwan



Penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.

7 FRAKSI DPRD BERAU SETUJUI RAPERDA PERUBAHAN APBD 2023 JADI PERDA

TANJUNG REDEB - Sebanyak 7 fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda, pada rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2023 di gedung DPRD Berau, Selasa (5/9/2023).

Bupati Berau Sri Juniarsih menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh legislatif yang telah menyampaikan pendapat akhir sekaligus memberikan persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2023.

Adapun Raperda tersebut sebelum ditetapkan akan disampaikan kepada Pemprov Kaltim terlebih dulu, paling lama tiga hari setelah dilakukan persetujuan bersama untuk dievaluasi yang kemudian ditetapkan melalui keputusan Gubernur Kaltim.

Dijelaskannya, Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD menjadi pedoman bagi Kepala Daerah dalam menyusun Perubahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023 yang selanjutnya telah dilalui dan dibahas bersama. Serta telah disepakati bersama dengan ditandatanganinya nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada tanggal 16 Agustus 2023.

Atas dasar kesepakatan tersebut menjadi acuan bagi segenap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang selanjutnya disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dan telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Berau melalui rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau pada tanggal 31 Agustus 2023 untuk kembali dibahas guna mendapatkan persetujuan dari legislatif.

"Semua pendapat akhir fraksi yang telah disampaikan merupakan pandangan dan penilaian dalam bentuk catatan, saran, masukan dan usulan maupun kritik. Yang tentunya menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti. Karena itu juga untuk pamban-

gunan di Bumi Batiwakkal tercinta," kata Sri, Selasa (5/9/2023).

Disebutnya, perubahan APBD Berau tahun anggaran 2023 telah ditetapkan sebesar Rp 5,176 triliun. Secara garis besar terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 4,374 triliun. Belanja daerah sebesar Rp 5,174 triliun. Serta pembiayaan daerah sebanyak Rp 802 miliar.

Terdapat kenaikan Raperda APBD Berau 2023, baik dari pendapatan maupun belanja. Jika dibandingkan dengan rancangan sebelumnya.

Besar harapan Sri kepada semua perangkat daerah untuk segera memulai proses pengadaan barang dan jasa yang dianggarkan dalam perubahan APBD 2023. Mengingat ada beberapa paket pekerjaan yang harus selesai dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2023.

"Optimalkan kinerja untuk penyelesaian kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga pada tahun anggaran 2023 realisasi belanja dapat meningkat dari tahun anggaran sebelumnya," pintanya. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Dezwan

KORAN **DIGITAL**

radar
MEDIA

RADAR BALIKPAPAN

EDISI RABU
6 SEP 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



BMKG : TITIK PANAS DI KALTIM BERKURANG DRASTIS



**DPRD DAN PEMKOT BALIKPAPAN
SEPAKATI RANCANGAN
KUPA PPAS TA 2023 SEBESAR RP 4,1 TRILIUN**



DPRD DAN PEMKOT BALIKPAPAN SEPAKATI RANCANGAN KUPA PPAS TA 2023 SEBESAR RP 4,1 TRILIUN

BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan kembali menggelar Sidang Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Kesepakatan itu dilakukan dengan penandatanganan berita acara Kesepakatan KUPA PPAS TA 2023 antara Wali Kota dan DPRD Kota Balikpapan dalam Rapat Paripurna ke III Masa Sidang III Tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan pada Senin (4/9/2023) kemarin.

Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmad Masud bersama Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh didampingi Wakil Ketua DPRD

Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle, Budiono, dan Subari.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh mengatakan, kesepakatan ini merupakan salah satu agenda dan kegiatan DPRD Kota Balikpapan melalui Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan yang mengharuskan kesepakatan di antara kedua belah pihak dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.

"Alhamdulillah sudah disepakati untuk KUPA-PPAS APBD Perubahan 2023 ini sebesar Rp 4,1 triliun," ujarnya, Selasa (5/9/2023).

Abdulloh mengaku nilai APBD Perubahan Balikpapan mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut masih prognosis yang menjadi dasar acuan dari tahun sebelumnya, seperti mempertimbangkan kekurangan kebutuhan dari segala macamnya.

"Tapi prognosis anggaran ini ada dasar aturan di UU yang boleh dipergunakan. Ya, mudah-mudahan tercapai semua itu karena pengimplementasian daripada APBD ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kota Balikpapan," jelasnya.

Lebih lanjut, Abdulloh menjelaskan, pada 11 September 2023 akan ada Nota Penjelasan dari Wali Kota Balikpapan agar APBD Perubahan terbentuk dulu sebelum APBD Murni 2024 yang lebih dahulu dilakukan kesepakatan di KUPA-PPAS.

"APBD Perubahan 2023 ini akan dilakukan secepatnya karena dibatasi selambat-lambatnya September ini sudah harus ditetapkan dari rancangan APBD Perubahan 2023," tutupnya. (ADV/DPRD Balikpapan/Bom)



Petugas sedang memadamkan karhutla di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Minggu (3/9/2023) (Antara / HO Pusdalops Kabupaten PPU)

BMKG : TITIK PANAS DI KALTIM BERKURANG DRASTIS

BALIKPAPAN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan menyebutkan pada Selasa (5/9) jumlah titik panas di Provinsi Kalimantan Timur (Kalim) turun menjadi 129, berkurang drastis ketimbang hari sebelumnya yang terdeteksi 406 titik.

"Sebanyak 129 titik panas tersebut terpantau hari ini mulai pukul 01.00 hingga 16.00 WITA dan tersebar di enam kabupaten," ujar Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggian BMKG Balikpapan Diyan Novrida di Balikpapan, Selasa (5/9/2023).

Titik panas merupakan indikator kebakaran hutan atau lahan (karhutla) yang terdeteksi dari suatu lokasi, dengan suhu relatif tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitarnya.

Untuk itu ia mengajak semua lapisan masyarakat saling menjaga dan waspada, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan, kemudian tidak melakukan pembakaran saat mengelola lahan agar tidak terjadi karhutla lagi, atau paling tidak mengurangi jumlah sebaran.

Ia mengatakan informasi sebaran titik panas tersebut telah disampaikan ke pihak terkait, termasuk ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendapat penanganan lebih lanjut.

Sebanyak 129 titik panas hari ini tersebar di Kabupaten Paser (10), Penajam Paser Utara (1), Kutai Barat (15), Kutai Timur (36), Kutai Kartanegara (26), dan Kabupaten Berau (41).

Rinciannya antara lain di Kabupaten Paser yang terdeteksi 10 titik

panas tersebar pada empat kecamatan yakni Batu Sopang (4), Batu Engau (3), Long Ikis (2), dan Kuaro (1) yang semuanya memiliki tingkat kepercayaan menengah.

Di Kabupaten Kutai Barat yang terdeteksi 15 titik panas, lanjut Diyan, tersebar pada empat kecamatan yakni Siluq Ngurai (5), Muara Pahu (4), Jempang (5), dan Dilangputi (1) yang semuanya juga memiliki tingkat kepercayaan menengah.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara yang terpantau 26 titik panas, tersebar pada tujuh kecamatan yakni Samboja (1), Sanga-Sanga (4), Muara Muntai (7), Muara Kaman (6), Loa Janan (2), Kenoh (2), dan Anggana (4), dengan tingkat kepercayaan menengah. (Ant/MK)

Pewarta : M.Ghofar

Editor : Risbiani Fardaniah



Seminar Ekonomi dengan tema "Tantangan dan Strategi dalam Menghadapi Arus Perpindahan Penduduk dan Stabilitas Kebutuhan Pokok di Balikpapan sebagai upaya penataan ekonomi kota penyangga IKN."

FKIP UNIBA GELAR SEMINAR EKONOMI ANTISIPASI ANCAMAN KEPADATAN PENDUDUK

BALIKPAPAN - Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kota Balikpapan ke depannya bakal mengalami perkembangan yang sangat pesat, termasuk pertumbuhan ekonomi hingga pertambahan penduduk.

Karenanya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Balikpapan (Uniba) pun menggelar seminar ekonomi dengan tema "Tantangan dan Strategi Dalam Menghadapi Arus Perpindahan Penduduk dan Stabilitas Kebutuhan Pokok di Balikpapan sebagai upaya penataan ekonomi kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara", Selasa (5/9/2023).

Pemateri tema tersebut disampaikan, Rektor Uniba Isradi Zainal, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan Haemusri Umar, Sekretaris Bappeda Litbang Balikpapan Achmad Syafei.

Ketua Panitia Seminar Ekonomi, Habib Fajar Saputra mengaku mengambil tema tersebut karena dalam FKIP ini

juga ada jurusan pendidikan ekonomi.

"Tema ini diangkat karena melihat dari permasalahan yang hari ini Balikpapan makin hari makin macet," ujarnya.

Menurut Fajar Saputra, kemacetan tidak terlepas adanya peningkatan jumlah penduduk di Kota Balikpapan seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Karena itu, kami mencoba mengangkat permasalahan tersebut yang dapat berdampak juga pada peningkatan kebutuhan pokok," jelasnya.

Fajar Saputra pun mengharapkan dari pemaparan pemateri dapat menjadi acuan upaya akademis apa yang bisa Uniba lakukan dalam menghadapi tantangan tersebut.

"Seperti Bappeda Litbang berbicara perencanaan dan penelitian pembangunan daerah, begitu juga dengan Disdag Balikpapan yang berbicara stabilitas kebutuhan pokok dan dari rektor sisi penguatan akademis ekonominya," tambahnya.

Kepala Disdag Kota Balikpapan, Haemusri Umar mengatakan, tantangan kebutuhan pokok sampai saat ini memang pemerintah tidak ada sarana dan prasarana (Sarpas) terkait dengan gudang pangannya. Itu yang dibutuhkan Kota Balikpapan saat ini.

"Populasi kita terus bertambah, sekarang saja sudah 727 ribu jiwa. Bayangkan dalam setahun naik 17 ribu jiwa. Nah, ini yang menjadi pikiran dari seluruh pemerintah soal sarana, prasarana dan utilitas (PSU) terkait sarana perdagangan yang ada di Kota Balikpapan," ujarnya.

Haemusri Umar pun berharap kebutuhan pangan untuk memenuhi kebutuhan 727 ribu jiwa ini bisa terpenuhi.

"Kaitan dengan IKN ini pasti multi playernya juga ada, tapi aspek sosialnya juga sangat tinggi. Nah, maka penting pemerintah itu melakukan kerja sama antar daerah khususnya wilayah penghasil. Ini yang penting," tutupnya.

Penulis: Apriant

Editor: Nicha Ratnasari



**LAHAN KEBUN WARGA TERBAKAR,
CAPAI 25 HEKTARE
AKIBAT ANGIN KENCANG**



**Istri Bupati Paser Diduga Manfaatkan
Kekuasaan Maju DPD RI,
Bawaslu Segera Lakukan Penelusuran**



Sinta Rosma Yenti maju DPD RI

Istri Bupati Paser Diduga Manfaatkan Kekuasaan Maju DPD RI, Bawaslu Segera Lakukan Penelusuran

PASER - Sinta Rosma Yenti, istri Bupati Paser, Fahmi Fadli, tengah jadi sorotan jagat media sosial lantaran diduga mengintruksikan kelompok ibu-ibu yang tergabung dalam Dasawisma dan Rukun Tetangga (RT) untuk mengumpulkan fotokopi KTP warga.

Permintaan pengumpulan fotokopi KTP warga itu ditujukan sebagai bentuk dukungan terhadap dirinya yang maju sebagai caleg DPD RI daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan nomor urut 17, yang akan bersaing dengan 20 caleg lainnya.

Adapun permintaan itu mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Paser. Hal itu diketahui berdasarkan tangkapan layar berisi pesan yang belum diketahui pengirimnya.

Akibat ramainya perbincangan itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Paser bakal melakukan penelusuran informasi tersebut. Komisioner Bawaslu Kabupaten Paser, Fauzan menyatakan, penelusuran dilakukan untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran.

"Kami akan melakukan penelusuran," kata Fauzan melalui pesan singkat di WhatsApp, Selasa (5/9/2023).

Fauzan menyebut, penelusuran dilakukan bukan berdasarkan laporan masyarakat. Namun dari informasi yang beredar di media sosial meskipun pihaknya enggan menyebut penelusuran seperti apa yang akan dilakukan.

"Tidak ada yang melaporkan, kami dapat informasinya dari media sosial," tambah Fauzan.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser, Abdul Qayyim Rasyid menyatakan, hingga

saat ini belum ada calon yang ditetapkan pada proses tahapan Pemilu 2024. Namun, yang ada masih bersifat Daftar Calon Sementara (DCS).

"Belum ada calon, semua masih DCS. Nanti jadi calon setelah penetapan DCT November nanti," kata Qayyim.

Berbagai upaya untuk mendapatkan konfirmasi dari yang bersangkutan belum didapati media ini. Beberapa kalangan juga turut menyebutkan agar TP-PKK Kabupaten Paser buka suara mengenai isu tersebut.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa Sinta Rosma Yenti diduga mengancam akan memotong Dana Desa jika warga tidak memilihnya. Hal ini terungkap dari cuitan @mazzini_gsp yang mengunggah bukti keluhan masyarakat atas yang tidak diketahui identitasnya.

**Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari**



Upaya petugas gabungan lakukan pemadaman

LAHAN KEBUN MILIK WARGA TERBAKAR, LUASAN CAPAI 25 HEKTARE AKIBAT ANGIN KENCANG

PASER - Lahan seluas 25 hektare di RT 04, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, hangus terbakar. Peristiwa itu terjadi pada 14.30 WITA, Selasa (5/9/2023). Kasus ini menambah catatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Paser.

Adapun kejadian ini, setelah salah seorang warga setempat melaporkan peristiwa tersebut ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Paser. Mendapati informasi itu, petugas langsung meluncur ke tempat kejadian untuk pemadaman api.

"Setelah informasi kami terima, personel gabungan langsung diarahkan menuju lokasi. Waktu tempuh ke lokasi dari posko sekira 15 menit dan pemadaman baru dapat dimulai 15 menit kemudian," kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Paser, Ruslan.

Adapun upaya pemadaman diakui mendapat kendala, lantaran unit truk pemadam milik BPBD Kabupaten Paser tidak mampu menjangkau titik api yang disebabkan nihil akses. Disisi lain, petugas kesulitan mencari sumber air dilokasi tersebut untuk

memadamkan api.

Sehingga petugas hanya mengandalkan pompa portable milik Manggala Agni untuk pemadaman. Dari total 25 hektare lahan yang terbakar, petugas hanya mampu memadamkan 5 hektare lahan sekitar.

"Pemadaman berlangsung selama 45 menit. Jadi petugas disiagakan dilokasi untuk memastikan tidak ada muncul titik api lagi," kata Ruslan.

Sementara personel yang terlibat dalam upaya penanggulangan ini, diantaranya BPBD Kabupaten Paser, Manggala Agni, Kodim 0904/PSR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Paser, Balakar dan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut, namun petugas mengidentifikasi lahan yang merupakan kawasan perkebunan, milik inisial M (68), warga Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot.

"Selain keterbatasan sumber air dalam pemadaman kali ini, luasnya lahan yang terbakar turut disebabkan oleh angin kencang yang terjadi," tutupnya. **(bs)**

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI RABU
6 SEP 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



**WAGUB: INVESTASI SDM UNGGUL,
BEASISWA KALTIM TUNTAS
BAIKNYA TERUS LANJUT**



**ARIE
WIBOWO**

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG



Kasi Intel Kejari Samarinda Erfandy Rusdy Quiliem (ANTARA / M Ghofar)

Jampidum Setujui 5 Permohonan RJ oleh Kejari Samarinda

SAMARINDA - Jaksa Agung Muda Tindak Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyetujui permohonan lima perkara penghentian penuntutan atau restorative justice (RJ) di pengadilan yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda.

"Permohonan penghentian penuntutan berdasarkan RJ telah mendapat persetujuan dari Jampidum, diwakili Plt Direktur Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda pada Kejaksaan Agung," ujar Kasi Intel Kejari Samarinda Erfandy Rusdy Quiliem dalam keterangan tertulis di Samarinda, Selasa (5/9/2023).

Atas persetujuan permohonan RJ atau keadilan restoratif tersebut, lanjutnya, maka untuk berikutnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samarinda Firmansyah Subhan segera menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2).

Sebelumnya, Kamis (31 Agus-

tus), Kajari Samarinda, Kalimantan Timur melaksanakan pemaparan RJ dengan didampingi Kasubag Pembinaan Alfano Arif Hartoko, Kepala Seksi PB3R Julius Michael Butar-Butar, dan para Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Lima perkara yang diajukan untuk mendapat keadilan restoratif itu adalah dua perkara penganiayaan, tiga perkara lainnya adalah kecelakaan lalu lintas, pencurian, dan penadahan. Ia merinci pengajuan penghentian penuntutan tersebut dengan tersangka FA dan KP dalam perkara tindak pidana penganiayaan seperti yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP).

Kemudian tersangka MY atas kelalaian hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Lantas tersangka Sa dengan perkara tindak pidana pencurian sesuai Pasal 362 KUHP, dan

tersangka ZI melakukan perkara tindak pidana penadahan sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP

"Lima tersangka tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana. Atas dasar tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejari Samarinda mempertimbangkan agar tersangka dan korban menem-puh penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif," katanya.

Sebelumnya, lanjut Erfandy, JPU sebagai fasilitator telah mempertemukan tersangka dan korban untuk langkah pertama pelaksanaan RJ, sesuai peraturan Kejaksaan RI Nomor 15/ 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

"Adapun hasil dari mediasi adalah pihak korban bersama keluarga dan tersangka, sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan, sehingga kemudian diajukan RJ," kata Erfandy. (Ant/MK)

Pewarta : M.Ghofar

Editor : Indra Gultom



INVESTASI SDM UNGGUL, WAGUB BERHARAP BEASISWA KALTIM TUNTAS TERUS LANJUT

SAMARINDA - Program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) telah menjadi bagian integral dari upaya Pemprov Kaltim membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di Kaltim.

Diluncurkan tahun 2019 dan berlanjut hingga tahun 2023, program ini menjadi salah satu prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Isran Noor-Hadi Mulyadi.

Hadi Mulyadi menegaskan pentingnya program BKT sebagai investasi dalam masa depan Kaltim. Karena itulah, ia berharap program ini terus berkelanjutan dan tetap menjadi prioritas bagi kepemimpinan selanjutnya, baik Penjabat (Pj) Gubernur maupun Gubernur terpilih pada Pilgub 2024 mendatang.

"Kita sangat mengharapkan, siapapun Pj Gubernur Kaltim

nanti, dan gubernur terpilih mendatang, program BKT harus tetap berlanjut, karena sangat bermanfaat bagi anak-anak kita dan generasi muda di Kaltim," beber Hadi.

Dikatakannya, BKT telah menjadi salah satu program beasiswa terbesar sepanjang sejarah di Kaltim. Sebab, anggaran sekitar Rp1,2 triliun dialokasikan hingga APBD perubahan tahun 2023.

"Ini menjadi komitmen pemerintah untuk mempersiapkan SDM yang kompeten dalam berbagai sektor untuk masa depan yang lebih baik," tuturya.

Menurut politisi Partai Gelora ini, pembangunan SDM adalah investasi jangka panjang yang mungkin tidak akan langsung dirasakan, tetapi akan memberikan manfaat besar dalam 10 hingga 20 tahun mendatang.

Program BKT memainkan

peran penting dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk menghadapi tantangan masa depan.

Selain itu, program ini juga sejalan dengan visi Kaltim yang berdaulat dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, khususnya bagi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Program BKT menjadi peluang besar bagi pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan tenaga kesehatan untuk mengambil bagian dalam pembangunan Kaltim yang lebih baik. Dengan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, mereka dapat menjadi agen perubahan yang memberikan kontribusi positif bagi perkembangan daerah ini dalam jangka panjang. **(MK)**

Editor: Agus Susanto